



PEMKAB
MAJALENGKA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Jaya Bergotong Royong

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2023



KECAMATAN ARGAPURA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt., sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka dapat terlaksana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2023.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan perjalanan Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka dalam mengiringi proses menuju Majalengka Raharja. Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya. Kami terus beradaptasi dan berinovasi demi menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat Majalengka.

Majalengka, Pebruari 2024

Camat Argapura



BANI FADILAH RANANDAR, S.STP., M.AP

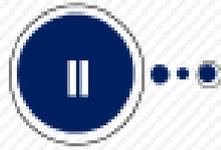
Pembina

NIP. 19860327 200412 1 002

Diketahui oleh,	
Sekretaris	
Kasi Pem YanUM	
Kasi Kesos	
Kasi Trantibum	
Kasi PPM	



KATA PENGANTAR



DAFTAR ISI



BAB I PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM

DATA KEPEGAWAIAN

ISU STRATEGIS

SISTEMATIKA PELAPORAN



BAB II PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS

PERKIN 2023

RENCANA ANGGARAN 2023



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

PENGUKURAN KINERJA 2023

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

AKUNTABILITAS KEUANGAN

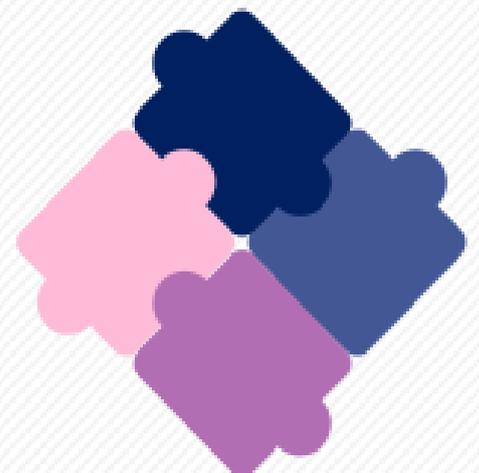


BAB IV PENUTUP



LAMPIRAN

Daftar Isi



BAB 1

PENDAHULUAN

Gambaran Umum

Data Kepegawaian

Isu Strategis

Sistematika Pelaporan

BAB 1

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan Pelaporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setia Instansi Pemerintah atas Penggunaan Anggaran. Selain itu, Pelaporan Kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada stakeholder, Laporan Kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Kecamatan Argapura setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Kecamatan Argapura Tahun 2018-2023, Rencana Kerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

1.1 Gambaran Umum Kecamatan Argapura

a. Kedudukan

1. Kecamatan adalah merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Camat sebagai Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya.

b. Tugas dan Fungsi

1. Kecamatan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan

umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, membina dan mengawasi pemerintahan desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan serta melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksanakan tugas pembantuan.

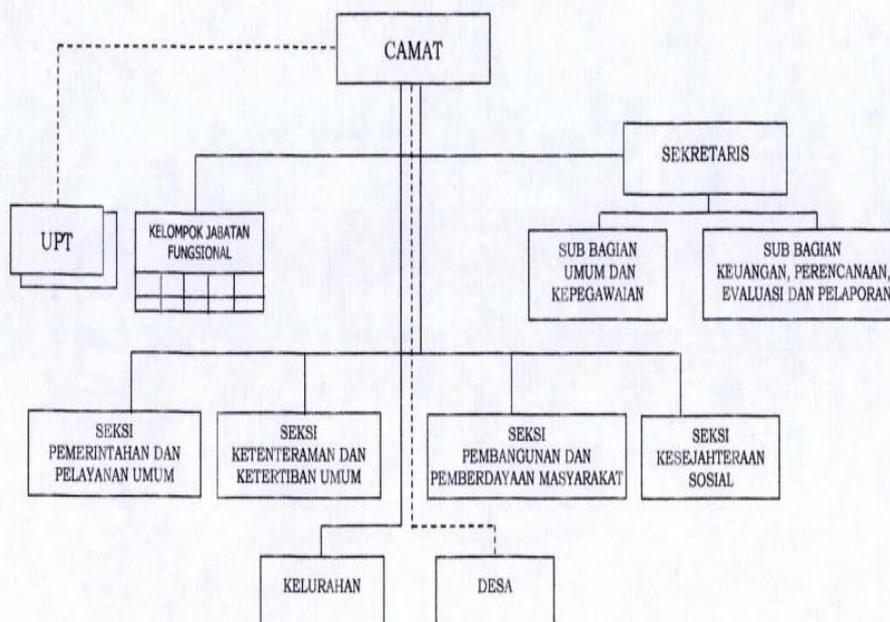
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin 1 Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan keteruban umum;
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan;
 - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
 - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;

- i. Melaksanakan tugas pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

c. Bagan Struktur Organisasi

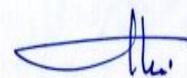
LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR : 45 Tahun 2019
 TANGGAL : 23 Desember 2019
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN
 KABUPATEN MAJALENGKA



BUPATI MAJALENGKA,
 ttd
 KARNA SOBAHI
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN MAJALENGKA,

 AHMAD SODIKIN
 Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI
 NIP. 19680327 199603 1 003

1.2 Data Kepegawaian

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka per Tanggal 31 Desember Tahun 2023 berjumlah 17 orang dengan rincian sebagai berikut:

a. Jenis Kelamin

Perempuan : 3 Orang

Laki-laki : 14 Orang

b. Eselon

Eselon II a:

Eselon II b:

Eselon III a : 1 orang

Eselon III b : 1 orang

Eselon IV a : 4 orang

Eselon IV b : 2 orang

Non Eselon : 9 orang

c. Golongan

	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV
PNS	1	4	10	2
PPPK				

d. Jenis Jabatan

Jabatan Struktural : 8 orang

Jabatan Fungsional : -

Jabatan Pelaksana : 9 orang

e. Pendidikan

SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3
1	-	7	-	-	-	7	2	-

INFOGRAFIK ASN KECAMATAN ARGAPURA

Laki-laki

14 Orang



Perempuan

3 Orang



Eselon



PNS			
I	II	III	IV
-	-	2	6
PPPK			
I	II	III	IV
-	-	-	-

I C	1
II C	1
II D	3
III A	3
III B	1
III C	2
III D	3
IV A	3

Golongan

Jenis Jabatan



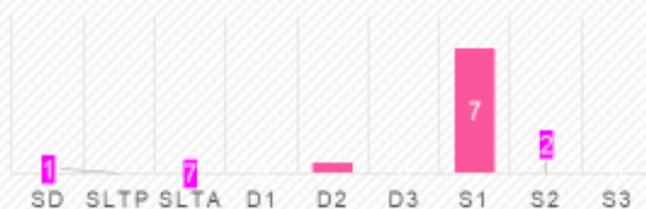
STRUKTURAL



PELAKSANA



FUNGSIONAL



Pendidikan

1.3 Isu Strategis

Isu Startegis Kecamatan Argapura adalah:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Harapan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kecamatan Argapura adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Argapura.
2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat.
Tugas Kecamatan adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang salah satu tugasnya adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga bisa meningkatkan Ekonomi Pedesaan sesuai potensi unggulan desa, Dengan semakin berkembangnya tingkat kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang yang berbanding terbalik dengan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Kecamatan Argapura yang semakin lama semakin menghilang, diantaranya semangat kebersamaan dan gotong royong, maka kecamatan dituntut untuk lebih meningkatkan perannya dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa.
Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka salah satu fungsi kecamatan yang perlu ditingkatkan adalah pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama stakeholders lain, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa, sehingga dapat menjalankan pemerintahan desa sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 dan meningkatnya status kemajuan kemandirian desa.
4. Peningkatan Kualitas dan kuantitas sarana prasarana Infrastruktur Perdesaan

5. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram dan tertib di Masyarakat.

Kecamatan Argapura termasuk Kawasan PKL (Pusat Kegiatan Lokal). PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Selain itu juga Kecamatan Malausma akan di jadikan sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian, dan pengembangan kawasan wisata. Supaya fungsi pelayanan tersebut dapat sama-sama berkembang, dan kehadiran kegiatan komersial dan pengembangan pariwisata dapat dikendalikan, maka dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama pihak terkait lain (Polsek dan Koramil), serta dengan lebih meningkatkan pemberdayaan dan peran aktif masyarakat, diharapkan dapat memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan perundang-undangan sehingga tercipta kondusifitas di wilayah Kecamatan Argapura.

1.4 Sistematika Pelaporan

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan Argapura Tahun 2023 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terjadi dari visi misi, tujuan, sasaran dan perjanjian kinerja tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi

BAB IV **PENUTUP**

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya

LAMPIRAN

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Bukti Penyebaran LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup Kecamatan Argapura serta SK Tim Penyusunan LKIP.

INFOGRAFIK ASN KECAMATAN ARGAPURA

Laki-laki

14 Orang



Perempuan

3 Orang



Eselon



PNS			
I	II	III	IV
-	-	2	6
PPPK			
I	II	III	IV
-	-	-	-

I C	1
II C	1
II D	3
III A	3
III B	1
III C	2
III D	3
IV A	3

Golongan

Jenis Jabatan



STRUKTURAL



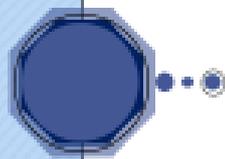
PELAKSANA



FUNGSIONAL



Pendidikan



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

RENSTRA

PERKIN 2023

Rencana Anggaran 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Argapura Tahun 2018-2023 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Majalengka Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023. Pada Renstra Perubahan terdapat 6 program.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Berikut tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) selama lima tahun dengan target sebelum dan setelah perubahan :

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	Nilai	77	75	84,2	100	85,11

Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan

Perjanjian Kinerja Kecamatan Argapura Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terciptanya Situasi dan Kondisi yang Aman, Tentram dan Tertib di Masyarakat	Presentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Skala Kecamatan	90 - 100 %
		Presentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	90 - 100 %
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Capaian Sakip Perangkat Daerah	BB Nilai
		Capaian SKM Perangkat Daerah	B Nilai
		Tingkat Pemenuhan Urusan Penunjang Pelayanan Perkantoran	90 - 100 %
		Presentase Warga Yang Terlayani Oleh Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	90 - 100 %
3.	Meningkatnya Status Kemajuan Kemandirian Desa	Meningkatnya Status Kemajuan Kemandirian Desa	7,14 - 14,28 %
		Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	90 - 100 %

Perjanjian Kinerja Setelah Perubahan

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 Kecamatan Argapura

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023 KECAMATAN ARGAPURA			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,11 %

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, ditetapkan Rencana Anggaran Tahun 2023 yang terdiri dari:

Rencana Anggaran Tahun 2023 Sebelum Perubahan

Program	Rencana Anggaran (Rp)	Persentase (%)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.075.000,00	0,35
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	69.640.000,00	2,32
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.795.272.472,00	87,91
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	32.599.900,00	3,17
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	166.876.100,00	6,12
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.600.000,00	0,14
JUMLAH	3.077.063.472,00	100

Rencana Anggaran Tahun 2023 Setelah Perubahan

Program	Rencana Anggaran (Rp)	Persentase (%)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.075.000,00	0,34
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	60.640.000,00	2,25
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.377.948.975,00	88,29
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	82.599.900,00	3,07
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	159.546.600,00	5,92

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.600.000,00	0,13
JUMLAH	2.693.410.475,00	100

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja 2023

Analisis Capaian Kinerja

Akuntabilitas Keuangan

Capaian kinerja Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan Sasaran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kepuasan Masyarakat yang terdapat dalam Rencana Strategis. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 sebesar 100%. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram berikut:

Capaian IKU

100

IKU 1

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian kinerja Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan Sasaran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kepuasan Masyarakat yang terdapat dalam Rencana Strategis. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukutan capaian kinerja Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 sebesar 100%.

3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	85,11	85,11	100%

3.2 Analisis Capaian Kinerja

INDIKATOR 1 Indeks Kepuasan Masyarakat

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	85,11	85,11	100%

Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Argapura Tahun 2023 adalah 85,11 dengan kategori BAIK



2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Peningkatan/ Penurunan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	85,11	84,50	Kenaikan 0,61

Realisasi tahun 2023 dan 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,61 nilai.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2022	Peningkatan/ Penurunan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	100%	100%	Tetap



3. Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	85,11	87	97,8%

Target akhir Renstra sebesar 87 sedangkan realisasi sebesar 85,11. Sehingga IKM Kecamatan Argapura baru bisa mencapai 97,8%



4. Perbandingan Realisasi 2023 dengan rata-rata/standar Provinsi/Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Rata-rata Provinsi/Nasional	Hasil Perbandingan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	85,11	91,61	92,9%

Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Argapura dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat sebesar 92,9%.



5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya

a. Faktor Keberhasilan Sumber daya manusia dan peralatan yang memadai salah satu pendorong keberhasilan selain itu, kantor Kecamatan Argapura berada di sentral wilayah diantara desa-desa, sehingga mudah dijangkau, Bangunan kantor kecamatan yang cukup representatif, Sumberdaya alam cukup memadai untuk dikembangkan, Kultur kegotongroyongan masyarakat yang masih kuat.

b. Faktor Penghambat sumber anggaran yang belum memadai, sehingga pelayanan belum maksimal. Masih kurangnya koordinasi dengan OPD terkait, belum lancarnya pasokan sarana dan prasarana pelayanan sehingga pelayanan sering terjadi keterlambatan. yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mengungkit potensi unggulan desa di wilayah kecamatan Argapura. Masih rendahnya penguatan kapasitas

kinerja apartur pemerintahan desa dan kualitas serta kuantitas sarana prasarana infrastruktur perdesaan.

c. Upaya yang telah dilakukan adalah Meningkatkan pemberdayaan dengan memanfaatkan potensi dan sumberdaya alam dan kultur masyarakat yang dimiliki sehingga potensi tersebut dapat lebih bernilai guna dan berhasil guna. Melakukan Pembinaan Memotifasi dan memfasilitasi dengan berbagai pembinaan dalam peningkatan pemberdayaan kepada masyarakat, melalui program dan kegiatan yang cukup strategis serta meningkatkan pemberdayaan dengan berkoordinasi dengan OPD lain, memanfaatkan potensi dan sumberdaya alam serta kultur masyarakat yang dimiliki sehingga potensi tersebut dapat lebih bernilai guna dan berhasil guna. Kemudian dalam Program Pelayanan Publik Kecamatan Argapura telah berupaya dan berusaha dalam rangka memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga berdampak baik pada peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

- 1) Pelayanan pembuatan atau pembaharuan KTP-elektronik sebanyak 3.186 kartu.
- 2) Pelayanan pembuatan atau pembaharuan KK sebanyak 4.373 Kartu.
- 3) Pelayanan pembuatan Surat Keterangan Domisili, Surat Rekomendasi, Proposal sebanyak 168 Surat.
- 4) Pelayanan pembuatan Surat Rekomendasi (dispensasi) Nikah sebanyak 74 Surat.

- 5) Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebanyak 72 Surat.
- 6) Pelayanan pembuatan Surat Rekomendasi Ijin Rame-rame sebanyak 56 surat

d. Upaya yang akan dilakukan Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya. Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama perwakilan pengguna layanan). Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan).

Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Waktu Penyelesaian	Peningkatan sosialisasi		√	√		Camat

6. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan

No.	Program	Pengampu	Anggaran
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian dan Kasubag KPEP	2.293.300.182
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kasi Kesejahteraan Sosial dan Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	82.599.300
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kasi PPM	3.600.000
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kasi Trantib	9.075.000
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kasi Kesejahteraan Sosial	60.640.00
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kasi PPM, Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum dan Kasi Trantib	159.546.600

7. Efisiensi Anggaran Jika IKU mencapai 100%

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada sasaran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas yaitu 4,15 % atau sebesar Rp. 108.495.598 dari pagu anggaran Rp. 2.608.761.682 dengan realisasi Rp. 2.500.266.084

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Serapan Anggaran (%)
1	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	IKM	100%	96,87

BAB 4

PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Argapura Tahun 2023 menyajikan pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan RPJMD, perbandingan dengan Jawa Barat, kendala yang dihadapi, Upaya yang telah dilaksanakan dan Upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian tahun selanjutnya.

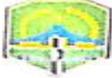
Capaian kinerja Kecamatan Argapura pada tahun 2023 sangat baik. Rata-rata capaian kinerja sasaran Strategis RPJMD yaitu 100% dari IKU sebanyak 8. Hal tersebut karena adanya komitmen dan kolaborasi semua bidang dalam menjalankan tugas.

Kecamatan Argapura pada Tahun 2023 berhasil menggunakan sumber daya sesuai peruntukannya. Efisiensi sumber daya keuangan pada tahun 2023 adalah sebesar 4,16% atau sebesar Rp. 108.495.598

Kecamatan Argapura terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan memaksimalkan koordinasi dengan semua bidang dalam menyelenggarakan system Pemerintahan yang akuntabel, berorientasi pada hasil yang berdampak bagi masyarakat.

LAMPIRAN 1

PERJANJIAN KINERJA (PERKIN) KECAMATAN ARGAPURA TAHUN 2023



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WAWAN KURNIAWAN, S.Sos., M.T.**
 Jabatan : **Camat Argapura**
 selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**
 Jabatan : **Bupati Majalengka**
 selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,
Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Majalengka, Januari 2023



WAWAN KURNIAWAN, S.Sos., M.T.
NIP. 195902051995031004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN ARGAPURA**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya Situasi dan Kondisi yang Aman, Tentram dan Tertib di Masyarakat	Presentase Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum Skala Kecamatan	90 - 100 %
	Presentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	90 - 100 %
2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Capaian Sakip Perangkat Daerah	BB Nilai
	Capaian SKM Perangkat Daerah	B Nilai
	Tingkat Pemenuhan Urusan Peranjang Pelayanan Perkantoran	90 - 100 %
	Presentase Warga Yang Terlayani Oleh Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	90 - 100 %
3. Meningkatnya Status Kemajuan Kemandirian Desa	Meningkatnya Status Kemajuan Kemandirian Desa	7,14 - 14,28 %
	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	90 - 100 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 8.075.000,00	APBD
2. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Rp 2.795.272.472,00	APBD
3. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 32.599.900,00	APBD
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 69.640.000,00	APBD
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 166.876.100,00	APBD
6. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 3.600.000,00	APBD
JUMLAH	Rp 3.077.063.472,00	



Pihak Kedua,
Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Januari 2023



WAWAN KURNIAWAN, S.Sos., M.T.
NIP. 195902051995031004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2023

Tambah Sasaran Kegiatan Cetak

Show 10 entries

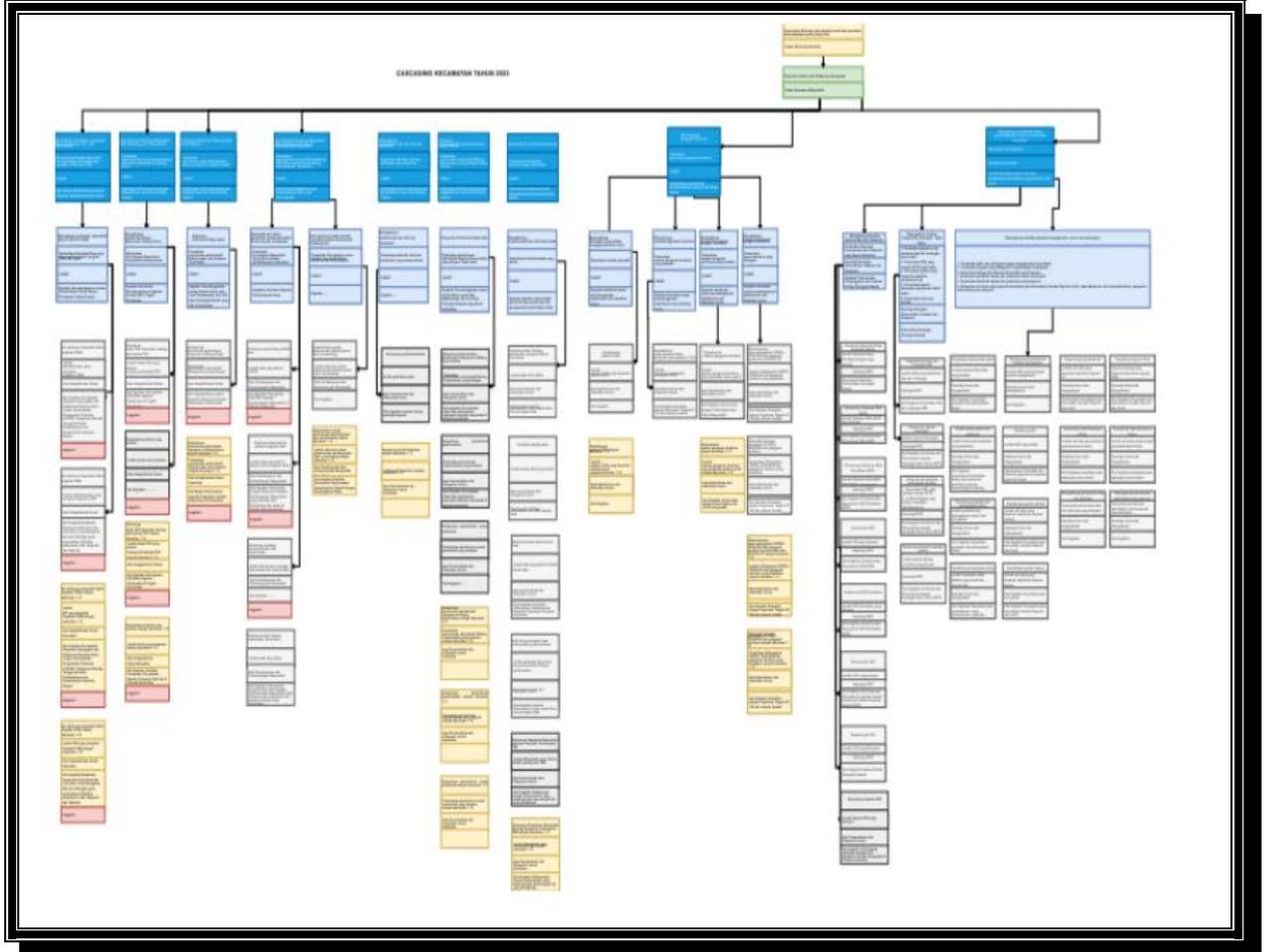
No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Kegiatan	Status	Edit	Hapus
1	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,11 Nilai		DISETUJUI		

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous 1 Next

LAMPIRAN 3

CASCADING KECAMATAN ARGAPURA TAHUN 2023



POHON KINERJA KECAMATAN ARGAPURA TAHUN 2023

POHON KINERJA KECAMATAN ARGAPURA TAHUN 2023													
VISI KABUPATEN MAJALENGKA "RAHARJA"	CAMAT ARGAPURA												
MSI 1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang dilandasi dengan pemerintahan yang bersih dan transparan serta pemberdayaan dan partisipasi masyarakat 2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, sejahtera, lestari, dan berkeadilan 3. Membangun yang berkeadilan dengan memajukan masyarakat yang berkeadilan, sejahtera, lestari, dan berkeadilan 4. Meningkatkan kualitas layanan publik masyarakat di bidang pemerintahan, kesehatan, pendidikan, pertanian, perikanan, pariwisata, pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat 5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik masyarakat di bidang pemerintahan, kesehatan, pendidikan, pertanian, perikanan, pariwisata, pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat	SEKRETARIAT KECAMATAN												
PROGRAM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota												
KEGIATAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
TERGET KEGIATAN	100 Persen												
ANGGARAN	Rp 2.795.272.472												
	BIDANG PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM			BIDANG KESEJAHTRAAN SOSIAL			BIDANG KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
PROGRAM	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Program Pembinaan dan Penguatan Pemerintahan Desa		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Program Koordinasi Ketertaman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketertaman dan Ketertiban Umum		Program Usaha Pemerintahan Umum	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pembinaan dan Penguatan Pemerintahan Desa	
TARGET KEGIATAN	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan		3 Sub Kegiatan			1 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	
KEGIATAN	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Ditimpalkan Kepada Camat	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penguatan Pemerintahan Desa		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sesuai Pengusutan Kepala Daerah	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penguatan Pemerintahan Desa
PENANGGUNG JAWAB	KASI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM				SEKSI KESEJAHTRAAN SOSIAL			SEKSI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
ANGGARAN	6.800.000	1.620.000	146.240.000		13.620.000	10.944.900	28.190.000	9.070.000	41.400.000	3.000.000	20.636.100		

Argapura, Februari 2023
CAMAT ARGAPURA

WAWAN KURNIAWAN, S.Sos.,M.
 NIP. 19690716 199503 1 004

KECAMATAN ARGAPURA KABUPATEN MAJALENGKA			
TAHUN 2023			
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	7 Sub Kegiatan /100%
2	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	Terdokumentasinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Sub Kegiatan/ 3 Dokumen
3	Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Khusus Pegawai	Presentase Pegawai Yang Terpenuhinya Kesejahtraannya menurut Peraturan Perundang-Undangan	1 Sub Kegiatan /100%

4	Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Kecamatan	9 Sub Kegiatan / 100%
5	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya sarana / prasarana dan Etos Kerja Aparatur	4 Sub Kegiatan / 100%
6	Peningkatan Sistem Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan	5 Sub Kegiatan / 100%
7	Peningkatan Pembangunan Desa	Meningkatnya Status Perkembangan Desa	7 Sub Kegiatan / 100%
8	Peningkatan Status Keamanan dan Ketertiban Umum di Masyarakat	Terwujudnya Situasi yang Kondusif	4 Sub Kegiatan / 100%

Argapura, Februari 2023

Camat Argapura



WAWAN KURNIAWAN, S.Sos.,MT
 Np. 19690716 199503 1 004

**SK TIM PENYUSUN LAKIP KECAMATAN ARGAPURA
TAHUN 2023****PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
KECAMATAN ARGAPURA**

Alamat : Jalan Raya SukasariKidul Tlp/ Faks (0233) 828872 Argapura – Majalengka 45462
email : argapuraoffice@gmail.com

**KEPUTUSAN CAMAT ARGAPURA
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : Tahun 2023

**TENTANG
TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)
KECAMATAN ARGAPURA KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2023**

CAMAT ARGAPURA

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. Bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang Selanjutnya disingkat dengan LAKIP Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) Tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Tim Penyusun LAKIP Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka tahun 2023.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1812);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14)
11. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Unsur Penunjang Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 28);
12. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Unsur Penunjang Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP) KECAMATAN ARGAPURA KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023**
- PERTAMA** : Tim Penyusun LAKIP Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Uraian Tugas Tim LAKIP Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Tahun 2023 sebagaimana pada dikum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi terkait LAKIP Kecamatan Argapura;
 2. Merumuskan isu-isu strategi Kecamatan Argapura
 3. Merumuskan tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran jangka menengah, Rencana Program, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Argapura;
 4. Melakukan evaluasi capaian kinerja Kecamatan Argapura berdasarkan sasaran / target kinerja Kecamatan Argapura periode sebelumnya;
 5. Menganalisa tantangan dan peluang pengembangan

6. pelayanan Kecamatan Argapura tahun 2023;
6. Menelaah terhadap permasalahan dan isu strategis Kecamatan Argapura berdasarkan tugas dan fungsi;
7. Menelaah visi, misi dan program KDH/WKDH terpilih;
8. Menelaah RPJMD Kabupaten Majalengka serta Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
9. Menyusun dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Argapura sesuai tahapan dan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Argapura
Pada tanggal : Januari 2024

Camat Argapura.



BANI PADILAH RANANDAR

LAMPIRAN 5

BUKTI SEBAR LAKIP KECAMATAN ARGAPURA TAHUN 2023

ARGAPURA Selalu dihati
Ahdj, Apep, Didi, Ekbang, Hadi, Hilal, Jubed, Kasi, Liska, Mp, Otong, Pa, Pa, Pol, Sekcam, Setiawan, Subag, Toink, Ulis, Ulis, +62 855-5954-2306, You

3 UNREAD MESSAGES

Ulis Nena Hermanto
Forwarded

JADWAL SALUR SEMBAKO PKH
KEC ARGAPURA

NO	NAMA DESA	JUMLAH KPM	WAKTU	TANGGAL	TEMPAT
1	SI BANGSI KEDIR	40	08.30 s.d 09.00		
2	TALANGSI KALIR	30	09.30 s.d 09.59		
3	TALANGSI	40	09.50 s.d 10.00		
4	SI BANGSI	30	10.00 s.d 10.30		
5	SI BATAHA	10	11.00 s.d 11.29		
6	SI BANGSI	30	11.30 s.d 11.59		
7	SI BANGSI	40	12.30 s.d 13.00		
8	ARGAPURA	30	13.40 s.d 13.00	SELASA, 19 MARET 2024	KANTOR KECAMATAN ARGAPURA
9	SI BANGSI	30	13.40 s.d 13.00		
DISTRIBUSI					
10	SI BANGSI	7	13.00 s.d 13.30		
11	SI BANGSI	10	14.00 s.d 14.30		
12	SI BANGSI	30	14.30 s.d 15.00		
13	SI BANGSI	30	14.00 s.d 14.30		
14	SI BANGSI	30	14.00 s.d 14.30		
15	SI BANGSI	30	14.30 s.d 15.00		
JUMLAH KPM		276			

8:27 AM

Forwarded

Assalamualaikum , ijin pak menyampaikan jadwal salur sembako/pkh selasa, 19 Maret 2024.. bertempat di Kecamatan...

8:27 AM

Pa Camat Bani
Forwarded

LAKIP KECAMATAN ARGAPURA 2
023.pdf
37 pages • PDF • 5 MB

11:26 AM

Type a message